



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA
2015-2017**

SKRIPSI

Muhamad Fadheli Ismail

1502015127

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA
2015-2017**

SKRIPSI
Muhamad Fadheli Ismail
1502015127

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA 2015-2017”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagian bahan pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap dari karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 9 Desember 2019

Yang Menyatakan,



(Muhamad Fadheli Ismail)

NIM. 1502015127

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAPA AKUNTANBILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA 2015-2017**



NAMA : **MUHAMAD FADHELI ISMAIL**

NIM : **1502015127**

PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**

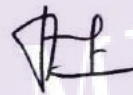
TAHUN AKADEMIK : **2019/2020**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Enong Muiz, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., BKP.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA 2015-2017**

Yang disusun oleh :
Muhamad Fadheli Ismail
1502015127

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 09 Desember 2019

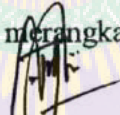
Tim penguji :

Ketua, merangkap anggota :



(Fitriya, S.E., Ak., CA., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Ir. Tukirin, M.M.)

Anggota :



(H. Enong Muiz, M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Sumardi, S.E., M.Si.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fadheli Ismail
NIM : 1502015127
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA 2015-2017”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Desember 2019
Yang Menyatakan,



(Muhamad Fadheli Ismail)
1502015127

ABSTRAKSI

Muhamad Fadheli Ismail (1502015127)

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI SUMATERA DAN JAWA 2015-2017.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 2017. Jakarta.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kinerja, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Sumatera dan Jawa.

Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanasi. Variabel yang diteliti adalah desentralisasi fiskal yang dibagi menjadi 2 (dua) proksi yaitu kemandirian keuangan daerah dan efektivitas, dan juga kinerja sebagai variabel independen. Akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 Provinsi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *judgement sampling*, sehingga diperoleh sampel berjumlah 16 Provinsi di Sumatera dan Jawa. Teknik pengumpulan data dengan telaah dokumen. Data penelitian diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa laporan realisasi anggaran dan opini audit, *website* Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa skor kinerja pemerintah daerah. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah regresi logistik, menilai *likelihood*, koefisien determinasi, *hosmer and lemeshow's goodness of fit test*, dan uji hipotesis secara parsial.

Hasil model regresi logistik yang di peroleh $\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 17,764 - 0,007 X_1 + 0,052 X_2 - 18,562 X_3$ Hasil menilai *likelihood* menunjukkan nilai *block number* = 0 (nol) sebesar 40,679 sedangkan nilai *block number* = 1 (satu) sebesar 37,556. Penurunan *likelihood* ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Hasil uji hipotesis secara parsial yang dilihat dari nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,084 atau 8,4% mengindikasikan bahwa variabel bebas dalam penelitian

ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 8,4%. Hasil uji omnibus Test menunjukkan signifikansi sebesar $0,508 > 0,05$ atau yang berarti model tidak mampu memprediksi nilai observasinya, dengan demikian kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi dengan koefisien regresi sebesar $-0,007$ dan tingkat signifikansi $0,541 > 0,05$.

Hasil uji hipotesis secara parsial variabel efektivitas menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi dengan koefisien regresi sebesar $0,052$ dan tingkat signifikansi $0,050 < 0,05$.

Hasil uji hipotesis secara parsial variabel kinerja menunjukkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi dengan koefisien regresi sebesar $18,562$ dengan tingkat signifikansi $0,999 > 0,05$.

ABSTRACT

Muhamad Fadheli Ismail (1502015127)

THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION AND PERFORMANCE OF THE LOCAL GOVERNMENT TO ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL REPORTING OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN SUMATERA AND JAVA 2015-2017.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 2017. Jakarta.

Keywords: Fiscal Decentralization, Performance, Financial Reporting Accountability

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization and performance on financial reporting accountability of provincial governments in Sumatra and Java.

In this study the explanatory method is used. The variable studied is fiscal decentralization which is divided into 2 (two) proxies, namely regional financial independence and effectiveness, and also performance as an independent variable. Accountability of financial reporting as the dependent variable. The population in this study amounted to 16 Provinces. The sample selection in this study used judgment sampling techniques, so that a sample of 16 Provinces in Sumatra and Java was obtained. Data collection techniques with document review. The research data was obtained from the Financial Inspection Board (BPK) in the form of a budget realization report and an audit opinion, the Ministry of Home Affairs (Ministry of Home Affairs) website in the form of a local government performance score. Data processing and analysis techniques used are logistic regression, assessing likelihood, determination coefficient, hosmer and lemeshow's goodness of fit test, and partial hypothesis testing.

The results of the logistic regression model obtained by $Ln = 17,764 - 0,007 X1 + 0,052 X2 - 18,562 X3$ The results of assessing the likelihood show the value of a block number = 0 (zero) of 40.679 while the value of a block number = 1 (one) of 37.556. This reduction in likelihood shows a better regression model or in other words the model is hypothesized fit with the data.

The partial hypothesis test results seen from the value of Nagelkerke R Square of 0.084 or 8.4% indicate that the independent variable in this study is able to explain the dependent variable of 8.4%. The omnibus test results show a significance of $0.508 > 0.05$ or which means the model is not able to predict the value of its observations, thus regional financial independence, effectiveness, and performance simultaneously influence the accountability of financial reporting

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi dengan koefisien regresi sebesar $-0,007$ dan tingkat signifikansi $0,541 > 0,05$.

Hypothesis test results partially the effectiveness variable showed a positive and significant effect on the financial reporting accountability of the provincial government with a regression coefficient of 0.052 and a significance level of $0.050 < 0.05$.

Hypothesis test results partially performance variables showed a positive and not significant effect on the financial reporting accountability of the provincial government with a regression coefficient of 18.562 with a significance level of $0.999 > 0.05$.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sangat berterima kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat, pengertian, motivasi, dan doanya selama peneliti menyusun skripsi ini. Hal ini merupakan sebuah langkah awal bagi peneliti di dunia kerja dan bertujuan untuk memenuhi syarat perkuliahan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, *Alhamdulillah* peneliti banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., MM., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi., SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Enong Muiz, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan koreksi serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapak Yanto, SE., M.Ak., BKP., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan koreksi serta arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis..
10. Kedua Orangtua, Adik, dan Keluarga Besar yang selalu memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk Dwi Andini Widyaputri yang selalu membantu dan memberi semangat untuk menyusun skripsi ini.
12. Serta Teman-teman M Gian Yana, Rangga Sukriyanto, Sayyid Ramadhan Z.A, M Dermawan, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu Kebersamaan yang begitu hangat diciptakan dan masukan yang membangun bagi saya saat penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segalanya dengan kebaikan dan keridhoannya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas kekurangan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kemajuan peneliti dalam kegiatan selanjutnya. Demikian, peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 09 Desember 2019
Peneliti,


(Muahamad Fadheli Ismail)
NIM. 1502015127

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUKKEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK/INTISARI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.2.3 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	8
2.2 Telaah Pustaka	30
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik	30
2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah	30
2.2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	31
2.2.2.2 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual	32
2.2.2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	32

2.2.3	<i>Desentralisasi</i>	36
2.2.3.1	<i>Pengertian Desentralisasi</i>	36
2.2.3.2	<i>Desentralisasi Fiskal</i>	37
2.2.3.3	<i>Desentralisasi Fiskal di Indonesia</i>	38
2.2.3.4	<i>Kemandirian Keuangan Daerah</i>	38
2.2.3.5	<i>Efektivitas</i>	40
2.2.4	<i>Kinerja</i>	41
2.2.4.1	<i>Pengertian Kinerja</i>	41
2.2.4.2	<i>Kinerja Pemerintah Daerah</i>	41
2.2.4.3	<i>Jenis-jenis Kinerja Pemerintah Daerah</i>	42
2.2.5	<i>Akuntabilitas</i>	44
2.2.6	<i>Jenis-jenis Laporan Keuangan Daerah</i>	44
2.2.6.1	<i>Laporan Realisasi Anggaran</i>	45
2.2.6.2	<i>Neraca</i>	46
2.2.6.3	<i>Laporan Arus Kas</i>	48
2.2.6.4	<i>Catatan Laporan Keuangan</i>	49
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	50
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i>	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metode Penelitian</i>	44
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i>	44
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i>	46
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	48
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	48
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	48
3.5	<i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i>	48
3.5.1	<i>Analisis Akuntansi</i>	48
3.5.2	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	49
3.5.3	<i>Analisis Regresi Logistik</i>	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian</i>	61

4.4.1	<i>Gambaran Umum Provinsi di Sumatera dan Jawa</i>	61
4.4.2	<i>Gambaran Umum Sampel Penelitian</i>	61
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Interpretasi	65
4.2.1	<i>Analisi Akuntansi</i>	65
4.2.1.1	<i>Kemandirian Keuangan Daerah</i>	65
4.2.1.2	<i>Efektivitas</i>	71
4.2.1.3	<i>Kinerja Pemda</i>	75
4.2.1.4	<i>Akuntabilitas Pelaporan Keuangan</i>	79
4.2.2	<i>Analisi Statistik</i>	82
4.2.2.1	<i>Analisi Deskripsi</i>	82
4.2.2.2	<i>Analisi Regresi Logistik</i>	84
4.2.3	<i>Pembahasan</i>	89
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	92
5.2	Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
	Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
	Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah	39
	Skala Interval Efektivita	40
	Operasional Variabel Penelitian.....	54
	Pemilihan Sampel Penelitian.....	56
	Kemandirian Keuangan Daerah	66
	Efektivitas	71
	Kinerja	76
	Akuntabilitas	79
	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	83
	Hasil Uji Koefisien Logistik	84
	Nilai $-2LL$ Likelihood (<i>Block Number</i>)	86
	Koefisien Determinasi.....	86
	<i>Hosmer and Lemeshow Goodness of fit Test</i>	87
	<i>Ominibus Test</i>	87

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
	Daftar Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.....	1/25
	Kemandirian Keuangan Daerah	2/25
	Efektivitas	4/25
	Skor Kinerja	6/25
	Opini Audit	8/25
	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015	10/25
	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016.....	12/25
	Pendapatan Asli daerah Tahun 2017.....	14/25
	Skor Kinerja Tahun 2015	16/25
	Skor Kinerja Tahun 2016.....	17/25
	Skor Kinerja Tahun 2017	18/25
	Hasil <i>Output SPSS</i> Versi 24	19/25
	Formulis Pengajuan Judul Proposal Skripsi.....	21/25
	Formulis Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	22/25
	Surat Tugas	23/25
	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I.....	24/25
	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II.....	25/25

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama di antara para peneliti dan peminat desentralisasi.

Sistem desentralisasi di Indonesia mulai diberlakukan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi desentralisasi fiskal ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan kemampuan ini menyebabkan adanya Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalami kemajuan pesat dan ada juga Pemda yang justru mengalami kemunduran sehingga harus dibantu oleh pemerintah pusat.

Moisiu (2013) menemukan adanya beberapa pemerintahan diberbagai Negara justru melakukan tindakan korupsi paska implementasi desentralisasi fiskal.

Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, di mana paska desentralisasi fiskal, penyelenggaraan pemerintahan diwarnai dengan meningkatnya kasus korupsi penyalahgunaan keuangan Negara. Hal ini menjadi hal penting untuk diteliti dalam rangka menjawab pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi paska implementasi desentralisasi fiskal.

Penguatan desentralisasi fiskal ini ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi pada 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya pada 2014 sebesar Rp573,7 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya (www.detiknews.com).

Berita di atas selaras dengan Fontanella dan Rossieta (2014) yang menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami perbaikan.

Desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat

dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pada kondisi mandiri dan ketergantungan pada pemerintah pusat suatu Pemda rendah, seharusnya Pemda akan lebih mampu dalam menjalankan aktivitas keuangannya sendiri, seperti mengatur dan menggali potensi keuangan, penganggaran, dan pengalokasian.

Desentralisasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Desentralisasi dapat memberikan tekanan kuat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Desentralisasi memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas paling baik diterapkan pada pemerintah lokal dimana penyerahan kewenangan membuat pemerintah lebih akuntabel dalam melakukan fungsinya. Desentralisasi juga dapat meningkatkan level partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam penyediaan barang-barang publik.

Fontanella dan Rossieta (2014) menemukan bahwa kinerja Pemda mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari penurunan jumlah Pemda yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) dan peningkatan indeks kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami perbaikan. Desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan serta kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Keuangan dan Kinerja.

Semakin mandiriya suatu daerah maka cenderung akan memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang baik yang ditandai dengan opini audit yang baik (Fontanella dan Rossieta, 2014). Semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemda, maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. Ketika suatu Pemda baik, maka terdapat kecenderungan untuk memberikan akuntabilitas yang baik (Wendy Budianto, 2012).

Penelitian Fontanella dan Rossieta (2014) menyatakan bahwa penerapan Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan penelitian, Anwar Prabu Mangkunegara (2012) Menyatakan Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sedangkan penelitian, Mardiasmo (2012) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan kepada pihak yang berwenang serta berani menerima konsekuensinya.

Berdasarkan fenomena serta permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di Sumatra dan Jawa. Maka penulis akan

melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa 2015-2017.”**

1.2 Permasalahan

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, dan Kinerja Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Bagaimanakah pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Bagaimanakah pengaruh Efektivitas terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Bagaimanakah pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas yaitu Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa 2015-2017.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas, dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Efektivitas terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera dan Jawa?

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dipelajari saat perkuliahan dengan melakukan penelitian secara langsung di bidang akuntansi mengenai akuntansi pemerintahan.

Bagi Akademik

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini masih relatif terbatas pembahasannya.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan proksi dari desentralisasi fiskal dengan pendekatan yang lainnya. Serta memperluas cakupan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah,



Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
Anwar Prabu Mangkunegara. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia..*
Bandung : Remaja Rosdakarya.

Baskaran, Thushyanthan, Lars P. Feld, dan Jan Schnellebach. (2014). *Fiscal Federalism, Decentralization and Economic Growth : Survey and Meta- Analysis. Cesifo Working Paper Vol. 54 No. 1445-1463 July 2014.* Jerman : University of Freiburg.

Bayu Kharisma. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 14 No. 2 Oktober 2013.* Bandung : Universitas Padjajaran.

Danu Putra Wijaya. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Klaten.* Skripsi. Surakarta : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

Fontanella dan Rossieta. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi Ke-17 September 2014.* Lombok : Simposium Nasional Akuntansi Ke-17.

Indra Bastian. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Erlangga.

Kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : Efek Moderasi dari Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 17 No. 2 Juli 2016.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Akuntabilitas dan Good Governance.* Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Mahmudi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press.

Manurung, Daniel. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika : Universitas Widyatama Bandung. Vol. 2 No. 1 Desember 2012.*

Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Penerbit Andi.

Moisiu, Aleksander. (2013). *Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. Journal Procedia Social and Behavioral Sciences Vol. 109 No. 459-463 December 2013.* Albania : University Durres..

Novianti Saffira. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah.* Skripsi. Surakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret.

Parson dan Wayne. (2012). *Public Policy ; Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Pasolong, Harbani. (2012). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.

Republik Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

_____. (1999). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta BPK RI.

_____. (1999). *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta BPK RI.

_____. (2004). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta BPK RI.

_____. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta BPK RI.

_____. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta BPK RI.

_____. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jakarta BPK RI.

Rini Dwi Astuti. (2014). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Surakarta : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.

Rodriguez, Andres dan Anne Kroijer. (2012). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe*. Growth and Change. *LEQS Paper No. 12* October 2009. Inggris : London School of Economics.

Singgih Santoso. (2012). *Statistik dengan SPSS*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sofyani Hafiez dan Rusdi Akbar. (2015). *Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja : Perspektif Ismorfisma Institusional*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Auditing* Vol. 19 No. 2 Desember 2015. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gajah mada.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Suyadi Prawirosentono. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta : BPFE.

Wendy Budianto. (2012). *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Gender terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi. Depok : Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

Yushkov, Andrey. (2015). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth : Theory, Empirics, and the Russian Experience. *Russian Journal of Economic* Vol. 1 No. 404-418 December 2015. Russia : University of Bonn.

Sumber Internet :

www.bpk.go.id

www.kemendagri.go.id

www.detiknews.com